



MENGURAI DAN Mencari SOLUSI KLITIH

Buat Satgas Khusus, Ortu Diminta 'Kepo'

FENOMENA sosial kejahatan jalanan oleh remaja atau dikenal klitih kembali marak setahunan ini. Upaya penindakan hukum sudah dilakukan, tapi klitih masih bermunculan. Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama, sehingga orangtua diminta lebih berperan memperhatikan dan memantau anak-anaknya. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersama Polresta dan TNI berencana membuat satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengatasi klitih.

Demikian hal yang mengemuka dalam fokus grup diskusi (fgd) mengurai dan mencari solusi permasalahan klitih oleh geng pelajar di Yogyakarta. Kegiatan yang diadakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Yogyakarta itu menghadirkan Walikota dan Wakil Walikota, Polresta dan Kodim setempat, PKK serta diikuti perwakilan SMP/SMA di Kota Yogyakarta.

Kepala Kesbang Kota Yogyakarta Zenni Lingga menyebut berdasarkan data yang dihimpun tahun 2018 tercatat ada 18 kejadian klitih. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah turun menjadi 16 kejadian klitih. Meskipun ada penurunan kasus, tapi hal itu cukup memprihatinkan karena pelakunya adalah kalangan pelajar.

"Meskipun ada penurunan, tapi fenomena klitih ini mence-derai Yogya sebagai kota pelajar dan tujuan wisata. Makanya permasalahan klitih ini harus diu-

rai dan dicari solusinya bersama-sama," kata Zenni saat FGD di Hotel Grage Sosrowijayan, Kamis (23/1).

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti berharap Yogya yang dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya tidak bertambah sebutannya menjadi kota klitih. Menurutnya jika fenomena sosial kejahatan jalanan oleh sebagian remaja itu dibiarkan, bisa membuat wisatawan yang berlibur di Yogyakarta takut jalan-jalan keluar di malam hari.

"Kami bersama Polresta dan Kodim buat Satgas khusus. Kami akan bantu personel dan anggarannya. Supaya tidak ada tempat yang nyaman bagi klitih. Jangan kasih kendor pada klitih," tegas Haryadi.

Pihaknya juga akan memben-tuk *call center* klitih. Termasuk program pembinaan terhadap para remaja yang terjaring pa-troli pengawasan klitih. Namun diakuinya kadang saat dilaku-

kan patroli jalanan kondisi aman. Tapi usai patroli, klitih kembali muncul. Oleh sebab itu pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan mencegah terjadinya klitih. Salah satunya dengan menggiatkan ronda di masyarakat dan tempat-tempat nongkrong anak muda di wilayah setempat.

Pihaknya juga meminta orangtua untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap aktivitas anak-anaknya. "Orangtua harus kepo. Tanya-kan anaknya di mana, ngapain, dengan siapa. Miliki kepedulian ke anak, misalnya jika malam hari belum pulang. Kami harap peran PKK jug ada program untuk menyambangi keluarga," te-rang Haryadi.

Sementara itu Komandan Ko-dim Yogyakarta 0374 Kol Arh Zaenudin mengatakan sudah memetakan fenomena klitih di Yogyakarta. Hasil pemetaan di antaranya kerlibatan klitih 68 persen atau paling banyak dari pelajar SMA dan sisanya pelajar SMP. Motif melakukan klitih di antaranya balas dendam, syarat masuk geng, mencari jati diri dan tantangan. Sedangkan latar belakang pelaku klitih antara lain dari keluarga bercerai dan kurang perhatian, geng kelompok sekolah, peredaran minum-an keras dan narkoba, lingkun-gan individualis hingga dicap



Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti bersama Kodim dan Polresta Yogyakarta dalam diskusi mengurai dan mencari solusi permasalahan klitih.

jelek,

"Perlu pemetaan dan pemberdayaan dalam mendeteksi dan mencegah klitih. Libatkan camat, lurah, babinsa dan babinkamtibas karena klitih adalah musuh kita bersama. Giatkan penertiban peredaran miras, tindakan represif hingga persuasif. Kami dari TNI selama ini mela-

kukan pembinaan ke pelajar lewat upacara di sekolah," jelas Kol Arh Zaenudin.

Sedangkan Kasat Binmas Polresta Yogyakarta, Kopol Kodrat menegaskan Polresta dan Polda sudah melakukan giat untuk mencegah dan mengatasi klitih. Namun hanya yang memenuhi unsur pidana misalnya ter-

kait undang-undang minuman keras dan narkoba maka anak diproses pidana.

"Anak-anak yang dilepas karena tidak memenuhi unsur pidana. Mereka diserahkan ke Bimas untuk dibina. Kalau ada yang memenuhi unsur pidana pasti akan dipidana," tandas Kopol Kodrat. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005